

**UPAYA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM  
MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN PP NO 84 TAHUN  
1999 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTA  
BUKITTINGGI DAN KABUPATEN AGAM**

*(Studi Pada Masa Pemerintahan Gubernur Gamawan Fauzi 2005-2010)*

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

**OLEH:**

**MONA EKA FITRI**

**BP. 06193027**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2011**

## ABSTRAK

Mona Eka Fitri (06193027), Pembimbing I Drs. Wahyu Pramono dan Pembimbing II Andri Rosta SIP,MPP, dengan judul penelitian Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengimplementasikan Kebijakan PP No 84 Tahun 1999 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi Dan Kabupaten Agam (Studi Pada Masa Pemerintahan Gubernur Gamawan Fauzi 2005-2010). Latar belakang penelitian ini diawali dengan adanya keinginan Bukittinggi untuk memperluas daerah ke Kabupaten Agam dan pada awalnya keinginan ini di setujui oleh Kabupaten Agam, dan atas persetujuan Presiden pada saat itu B.J. Habibie, maka di sahkannya Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Tetapi akhirnya PP No 84 Tahun 1999 ini di tolak oleh pihak pemerintah Kabupaten Agam, dan hal ini berlanjut sampai saat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (dokumentasi) dan lokasi penelitian ini di kota Padang yaitu di kantor pemerintah provinsi Sumatera Barat dan di kantor pemerintahan Kabupaten Agam serta kantor pemerintahan kota Bukittinggi untuk melakukan *cross chek* data. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edwards III, dengan melihat 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini antara lain (1) Apakah isi kebijakan tersebut sudah di sosialisasikan dengan baik dan dengan cara apa? (2) Bagaimana kualitas implementor yang mensosialisasikan Kebijakan Peraturan Pemerintah No 84 tersebut? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan implementor dalam kebijakan Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999 ini? dan (4) Apakah struktur organisasi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumbar dalam masalah Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999 ini terlalu rumit?

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah, upaya dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam mengimplementasikan kebijakan PP No 84 Tahun 1999 (1) Dalam upaya komunikasi ini pemerintah provinsi Sumatera Barat telah melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan aparatur pemerintah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dengan cara berusaha mengajak kedua aparatur pemerintah untuk mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk mensosialisasikan kembali mengenai kebijakan Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999, (2) pemerintah provinsi Sumatera Barat membentuk tim pengarah dan tim pelaksana kebijakan Peraturan Pemerintah No 84 Tahun, adapun aparatur pemerintah yang tergabung dalam tim yang dibentuk oleh Gubernur tersebut merupakan orang-orang yang mengalami pengetahuan terhadap Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999, (3) dalam upaya sikap, berdasarkan hasil penelitian, pemerintah provinsi Sumatra Barat telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dalam hal ini pemerintah sesuai dengan Inmendagri No 1 Tahun 2008, (4) Struktur birokrasi, dalam upaya kebijakan Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999 ini, pada dasarnya telah ada struktur organisasi atau prosedur standar organisasi yang akan mereka laksanakan. Dan orang-orang yang tergabung dalam organisasi ini pun, merupakan orang-orang yang secara mendasar mengetahui seluk-beluk Kebijakan Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan dan Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Kota merupakan kawasan pusat pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. Untuk itu, agar sebuah kota mengalami peningkatan, maka dibutuhkan pembangunan yang mampu menunjang kemajuan sebuah kota. Dalam mencapai perkembangan suatu kota dibutuhkan sarana dan prasana untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya luas suatu daerah menjadi penentu perkembangan suatu kota, dan salah satu solusi dari masalah ini adalah dengan adanya perluasan daerah, karena menurut hemat penulis, dengan adanya perluasan daerah maka perkembangan suatu daerah tidak lagi vertikal. Tetapi dengan adanya perluasan ini terkadang terjadi perdebatan atau kurang harmonisnya hubungan antar suatu daerah yang akan melakukan perluasan dengan daerah yang terkena perluasan.

Untuk Provinsi Sumatera Barat konflik perluasan daerah yang belum bisa diselesaikan sampai saat ini adalah konflik perluasan antara daerah Kota Bukittinggi dengan daerah Kabupaten Agam. Berdasarkan data dari BPS Tahun 2007, luas wilayah Kota Bukittinggi yaitu 25,24 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 100.000 jiwa, dan hanya seluas 18 km<sup>2</sup> yang efektif untuk bisa dikembangkan dalam perkembangan

suatu kota.<sup>1</sup> Kota Bukittinggi dikenal sebagai kota pendidikan, kesehatan dan kota pariwisata. Dengan luas daerah efektif yang digunakan untuk pengembangan kota yaitu seluas 18 km<sup>2</sup>, memungkinkan pembangunan di daerah ini berjalan secara vertikal, hal ini terwujud karena kekurangan lahan yang dimiliki Kota Bukittinggi tersebut kecil. Lain halnya dengan daerah yang terletak di pinggiran Kota Bukittinggi yaitu daerah Kabupaten Agam, Daerah Kabupaten Agam ini mempunyai wilayah seluas 2.232,30 km<sup>2</sup> dan dengan penduduknya berjumlah sekitar 500.000 jiwa, pernyataan tersebut bisa dilihat dari data BPS Tahun 2007. Dalam hal tersebut, bisa kita bandingkan bahwa secara geografis daerah Bukittinggi itu lebih kecil daripada daerah Agam.

Hal itulah yang mendasari Walikota Bukittinggi pada 8 Agustus 1983 menginginkan adanya perluasan kota. Dengan dasar pemikiran tersebut pemerintah Kota Bukittinggi pada saat itu menyampaikan keinginannya yang disampaikan dan ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat pada saat itu, dan atas keinginan yang di sampaikan pemerintah Kota Bukittinggi tersebut mendapat respon positif dari Gubernur Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan tanggapan Gubernur adalah sebagai berikut:

Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Dto Sekwilda Drs. Sjoerkani) melalui surat tanggal 3 Januari 1985, No 135/024/p3m 85 menyatakan;

---

<sup>1</sup> BPS Propinsi Sumatera Barat . Sumatera Barat Dalam Angka 2007(01-8-2007)

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### VI.1 KESIMPULAN

Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999 adalah sebuah Peraturan Pemerintah yang mengatur Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999 ini disahkan oleh mantan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 1999. Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999 ini diawali oleh rencana atau keinginan pemerintah Kota Bukittinggi untuk memperluas daerahnya, yang mana Kota Bukittinggi ini berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten Agam. Adapun batas luas Kota Bukittinggi berdasarkan data dari BPS Tahun 2007 adalah 25,24 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 100.000 jiwa, dan hanya seluas 18 km<sup>2</sup> yang efektif bisa dikembangkan dalam perkembangan suatu kota, sedangkan luas Daerah Kabupaten Agam berdasarkan data dari BPS Tahun 2007 mempunyai wilayah seluas 2.232,30 km<sup>2</sup> dan dengan penduduknya berjumlah sekitar 500.000 jiwa.

Walaupun Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam ini telah disahkan oleh presiden tetapi, sampai sekarang Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999 ini belum bisa dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Peraturan Pemerintah ini mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, adapun salah satu hambatan dari Peraturan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Bacaan

- Burhan Bungin. 2002. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Dunn, William N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press.
- Moleong, j lexy. 2009 *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung; Rosdakarya.
- Moh. Nazir, Ph.D. 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Riant D Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo kelompok gramedia.
- Sanapiah Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Malang. Malang YA3,
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*, Jogjakarta. Pustaka pelajar.
- Sumaryadi, 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta Citra Utama.
- Wibawa Samodra, Yuyun Purbokusumo, & Agus Pramusinto, 1994, *Evaluasi Kebijakan Public*, Jakarta; Raja Grafindo Persada